

ABSTRAK

Penanggung pribadi yang telah mengikatkan diri dan melepaskan hak istimewa akan menimbulkan tanggung jawab renteng dengan debitor utama. Ketika debitor utama tidak mampu lagi melunasi utangnya dapat mengakibatkan dipailitkannya debitor dan penanggung. Akan menjadi persoalan ketika penanggung meninggal dunia sehingga perjanjian penanggungan tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya. Perjanjian penanggungan yang memuat hak dan kewajiban dari penanggung menimbulkan konsekuensi terhadap ahli waris pengganti memikul beban menggantikan kedudukan dari penanggung sebagai debitor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dari penanggung pribadi terhadap kewajiban dari penanggung pribadi dan menganalisis apakah ahli waris pengganti dari penanggung pribadi dapat dimohonkan pailit atas kewajiban penanggungan pribadi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kedudukan ahli waris pengganti dari penanggung ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu sikap ahli waris terhadap warisan dan upaya ahli waris terhadap kewajiban yang ditinggalkan oleh penanggung yang telah meninggal dunia. Ahli waris pengganti dapat dimohonkan pailit bila menerima warisan sebagaimana dalam Pasal 21 UUK-PKPU sehingga sitaan umum terhadap seluruh harta debitor akan berdampak pada harta pribadi ahli waris tidak dapat dipisahkan dari harta warisan.

Kata Kunci : Ahli waris pengganti, Penanggung Pribadi, Kepailitan

ABSTRACT

Personal guarantor who have committed themselves and relinquished their privileges will incur joint responsibilities with the main debtor. When the main debtor is no longer able to pay off his debt can lead to bankruptcy of the debtor and the guarantor. It will be a problem when the guarantor dies so that the coverage agreement can be transferred to his heir. Underwriting agreements that contain the rights and obligations of the guarantor have consequences for the substitute heirs bearing the burden of replacing the position of the guarantor as the debtor. The purpose of this study is to analyze the position of a substitute heir against the obligations of a personal guarantor and analyze whether a substitute heir can be filed for bankruptcy on a personal guarantee. This research is a normative juridical study using the statute approach, conceptual approach and case approach. The position of a substitute heir of the guarantor are 2 (two) factors namely the attitude of the heirs to the inheritance and the efforts of the heirs towards the obligations left by the guarantor who has died. A substitute heirs can be filed for bankruptcy if they receive inheritance as referred to in Article 21 UUK-PKPU so that the general confiscation of the debtor's assets and the impact on the heirs personal assets cannot be separated from the inheritance.

Keywords : Substitute heirs, Personal Guarantor, Bankruptcy

MOTTO

Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak

di masa depan

(Amsal 19:20)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS PENGGANTI DARI PENANGGUNG PRIBADI (*PERSONAL GUARANTOR*) DALAM SENGKETA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1012 K/PDT-SUS.PAILIT/2016)”. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan tesis ini yaitu sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam pembuatan dan penyelesaian tulisan ini, selain untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelas Magister Kenotariatan, juga berusaha melalui tulisan ini kiranya dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi serta masyarakat pada umumnya dan khususnya almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Untuk dapat menyelesaikan tulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak Dr. M.Hadi Shubhan, S.H.,C.N., M.H. dan Ibu Dr. Soelistyowati, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kesabaran ditengah kesibukan dan kondisi kesehatannya, serta memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya serta memberikan arahan selama penyusunan kartu rencana studi maupun masa perkuliahan di Universitas Airlangga.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH., Bapak Gianto Al Imron, S.H., MH., dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
6. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan magister kenotariatan di Universitas Airlangga.
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran

proses perkuliahan dan urusan administrasi saya di Universitas Airlangga.

8. Kepada orang tua saya terkasih, Antonius Roni dan Djulita Tandi Massora yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, motivasi, nasihat serta doa yang menyertai setiap langkah saya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan magister ini.
9. Untuk keluarga besar terkasih, terutama untuk kakek M. Tiala Massora dan nenek Rufina Bunga, terimakasih atas doa, nasihat dan dukungannya yang menyertai setiap langkah saya sehingga dengan ini saya dapat menyelesaikan pendidikan magister ini.
10. Untuk kak Tommy H Timbang Allo beserta keluarga yang selalu menyemangati & mendukung saya selama menempuh pendidikan di Surabaya.
11. Victoria Pasari (Bewe), Adam Setiawan (Adam), Shoibul Khoir (Sohib), Ricka Aulia (Caca), Geraldine Yesi (Yesi), Fisuda Alida (Wanda), Qisty Armalia (Mba Qis), Nadya Tjung (Nadya) terima kasih selalu sabar dan membantu saya ketika kesulitan selama perkuliahan hingga saya bisa menyelesaikan studi.
12. Seluruh teman angkatan MKn Unair 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa serta dukungan kalian. Tetap yakin dan semangat dalam menggapai cita-cita.
13. Kepada pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu, memberikan semangat serta mendoakan penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik serta lulus pendidikan S2 tepat waktu ;

Akhir kata, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang baik dari Tuhan Yesus. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perjalanan penulisan tesis ini masih banyak kesalahan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya bisa menjadi bahan perbaikan sehingga dapat menyempurnakan tulisan tesis ini. Penulis juga mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi siapa saja yang membaca tesis ini.

Surabaya, 17 Januari 2020

Penulis,

Monika Ardia Ningsi Massora

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1012 K/PDT-SUS.PAILIT/2016.